



RENCANA KERJA

2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan tahapan perencanaan lanjutan setelah melalui proses pembahasan rancangan rencana kerja baik melalui proses forum SKPD, Musrenbang Provinsi maupun melalui proses Musrenbangnas yang dilakukan secara berjenjang dengan harapan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas dokumen perencanaan.

Dengan tersusunnya Dokumen ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pedoman semua pihak dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Nusa Tenggara Timur di Tahun 2023.

Kupang, 31 Maret 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Ondy Christian Siagian, SE., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19651219 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	21
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	30
 BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	32
3.3. Program Kegiatan	33
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	36
 BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan dibutuhkan sebuah rencana strategis (Renstra) yang dapat memberikan kejelasan arah (*clarity of direction*) dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan mencapai titik optimal yaitu kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Renstra akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian dituangkan dalam rencana program dan kegiatan pembangunan daerah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi sebagai salah satu dokumen perencanaan berada dalam lingkup perencanaan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Secara hirarkis dalam perencanaan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan berada pada tata urutan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 beserta revisinya;
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023
4. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 2013-2033;
5. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018-2023 beserta revisinya;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
7. Rencana Kerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan.

Hirarki perencanaan di atas menunjukkan bahwa terdapat urutan logis (*logic sequence*) antara Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dokumen perencanaan di atasnya, khususnya pada RPJMD Pemerintah Provinsi NTT 2018-2023. Artinya bahwa Rencana Kerja ini tidak berdiri sendiri tetapi

merupakan salah satu elemen dari sistem perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang komprehensif.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
11. dan Pulau-pulau Kecil;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo No. 3 Tahun 2008 tentang Tata, Hutan, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Jangka Panjang Kehutanan 2006 – 2025;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2023 dapat tercapai;
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan di kehutanan;
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Acuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja-SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggambarkan sejumlah target kinerja program / kegiatan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Evaluasi Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi program/kegiatan melalui formulasi tertentu sehingga diperoleh persentase capaian program/kegiatan. Beberapa kendala teknis maupun non-teknis menjadi hambatan pencapaian kinerja maksimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2021 telah dapat memenuhi target sebesar **197,90 %** dari sasaran strategis yang ditetapkan atau termasuk dalam kategori “**SANGAT BERHASIL**”.

Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan merupakan indikator lintas program sehingga pengukurannya tidak serta merta dapat diukur melalui output program, namun lebih dirinci pada pencapaian akhir target tahun berjalan.

1. **Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun** : Target indikator ini sebesar 0,07% untuk tahun 2021 dengan realisasi sebesar 0,22% atau seluas 1.816 hektar. **Capaian indikator sasaran ini mencapai 314,29 %** atau termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Hasil ini dicapai karena adanya penambahan realisasi dari DAK bidang kehutanan seluas 701 hektar;
2. **Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata** : Target capaian ini sebesar “**tidak dilaksanakan**” untuk tahun 2021, karena dari awal penyusunan Renatra DLHK pada tahun ini derencanakan untuk dilakukan sosialisasi dan FGD untuk Kawasan Ekosistem Esensial pada 2 dokumen yang telah ditetapkan tahun sebelumnya.
3. **Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA** : Target capaian ini sebesar 2,5 % atau sebanyak 3 lokasi dengan realisasi sebanyak 3 lokasi atau sebesar 2,5%. Capaian indikator sasaran untuk tahun 2021 sebesar 100%. Capaian ini dicapai melalui pembangunan hutan wisata di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai serta di Kabupaten Ngada melalui pembiayaan CSR.

4. **Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus :** Target capaian ini sebanyak **“tidak dilaksanakan”** untuk tahun 2021, karena adanya perubahan kebijakan dalam penyuluhan kehutanan. Perubahan tersebut berupa penggunaan aplikasi SIMLUH dan SIMPING dalam pelaksanaan penyuluhan mulai tahun 2022, sehingga penganggaran untuk uji kompetensi dirubah untuk pembinaan dan bimbingan teknis penyuluh dalam rangka penggunaan aplikasi SIMLUH dan SIMPING. Namun karena pentingnya uji kompetensi bagi pegawai berkeahlian khusus, maka secara mandiri telah dilakukan uji kompetensi untuk 10 orang dan seluruhnya dinyatakan lulus.
5. **Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial :** Target capaian ini sebesar 9,38 % dengan realisasi seluas 54.917,34 hektar atau sebesar 11,72%. Capaian indikator sasaran ini dicapai dengan prosentase 124,95 % atau termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Capaian ini tercapai karena adanya perubahan pembagi pada PIAPS dari 536.118,04 hektar menjadi seluas 468.604,53 hektar.
6. **Persentase meningkatnya kualitas DAS :** Target capaian ini sebesar 0,10 % atau sebanyak 4 DAS dengan realisasi sebanyak 4 DAS atau sebesar 100 % atau termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Capaian ini dicapai melalui restorasi sungai di DAS Benanain, DAS Noelmina, DAS kadahang dan DAS Aesesa.
7. **Luas Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH:** Target capaian ini sebesar 42,86% atau secara kumulatif sebanyak 9 dokumen dari kondisi tahun sebelumnya sebanyak 7 dokumen. Realisasi tahun 2021 indikator sasaran ini berupa Dokumen IKPLHD Provinsi NTT dan ILHK, dengan capaian sebanyak 2 dokumen (9 dokumen hingga tahun 2021) atau sebesar 100%. Capaian ini termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**.
8. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :** Target tahun 2021 indikator sasaran ini sebesar 75,21 poin dengan realisasi sebesar 74,21 poin. Capaian indikator ini sebesar 98,77% termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Capaian ini dicapai melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 58,28 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 82,45 poin, Indeks Tutupan Lahan sebesar 58,65 poin dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 87,07 poin.

9. **Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah** : Target indikator sasaran ini sebesar 10% dengan realisasi sebanyak 102.009 kg dari jumlah potensi timbunan sebanyak 91,25 ton. Persentase realisasi indikator sasaran ini sebesar 11,18% atau dengan capaian kinerja sebesar 111,8 % termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini diperoleh dari pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dari 41 fasilitas pelayanan kesehatan.
10. **Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH** : Target indikator sasaran ini merupakan target kumulatif yang hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sebanyak 50 dokumen. Tahun 2021 indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 58,26% dengan realisasi sebanyak 15 dokumen atau secara kumulatif sebanyak 36 dokumen setara dengan 72 %. Capaian kinerja indikator ini sebesar 123,58% termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.
11. **Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah** : Target indikator sasaran ini merupakan target tahunan berdasarkan hasil penetapan pemenang penghargaan lingkungan hidup yang diberikan. Tahun 2021 ditargetkan sebesar 8,33 % dengan realisasi sebanyak 12 pemenang penghargaan Kalpataru dari 17 usulan yang diusulkan oleh 16 Kabupaten dan hasil pembinaan dari 7 Kabupaten. Capaian realisasi indikator ini sebesar 50% atau dengan capaian 600% termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.
12. **Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani** : Target indikator sasaran ini merupakan target tahunan berdasarkan hasil jumlah pengaduan dan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani. Target pada tahun 2021 sebesar 33,33% dengan realisasi sebanyak 21 pengaduan dan kasus. Realisasi dari penanganan pengaduan dan kasus sebesar 100% dengan capaian indikator sebesar 300 % termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini dicapai melalui penanganan pengaduan dan kasus dari sektor lingkungan hidup sebanyak 6 pengaduan dan dari sektor kehutanan sebanyak 15 pengaduan dan kasus.
13. **Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah** : Target indikator sasaran ini diperoleh dari jumlah sampah yang ditangani dibagi dengan jumlah potensi timbunan sampah. Tahun 2021 target ini dilakukan refocusing sehingga menjadi “**tidak**

dilaksanakan” karena refokusing dilakukan pada pembangunan TPS berpilah sebanyak 2 unit yang direncanakan untuk penanganan sampah.

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pencapaian Restra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan s/d 2022

No	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan			Target capaian kinerja Restra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2020	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Restra PD s/d dengan tahun 2022	
							Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Restra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11			Urusan Wajib/ Lingkungan Hidup								
2	11	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,66 Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,66 Poin	67,75 Poin	75,21 Poin	74,21 Poin	98,77%	75,42 Poin	75,42 Poin 100 %
2	11	02	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi							
2	11	02	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Tersedianya dokumen KLHS							
2	11	03		Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,66 Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,66 Poin	67,75 Poin	75,21 Poin	74,21 Poin	98,77%	75,42 Poin	75,42 Poin 100 %
2	11	03	01	Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup								

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2020	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2	11	03	02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
2	11	05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Imbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang diangkut dan diolah 51,33 %	Persentase Limbah B3 yang diangkut dan diolah 51,33 %	0 %	10 %	11,18 %	111,8 %	27,33 %	27,33 %	100 %
2	11	05	01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	Jumlah LB3 yang diolah								
2	11	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH 100%	Persentase pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH 100%	59%	59%	58,26 %	98,74%	79,09%	79,09%	100%
2	11	06	01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang								

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2020	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
					diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								
2	11	09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup disuatu daerah 25%	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup disuatu daerah	0%	8,33%	50 %	600%	16,67%	16,67%	100%
2	11	09	01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi NTT	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi NTT								
2	11	10		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani 50%	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	0 %	33,33%	100 %	300 %	50 %	50 %	100 %
2	11	10	01	Penyelesaian Pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi									
2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan dan penanganan sampah 27 %	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	0 %	0%	0%	100 %	0%	0%	100%
2	11	11	01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2020	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
3	28	03		Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun 1,30 %	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,02 %	0,07 %	0,22 %	314,29 %	1,30 %	1,30 %	100 %
3	28	03	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Propinsi	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Propinsi								
3	28	03	3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								
3	28	03	3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								
3	28	03	5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								
3	28	03	6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)									
3	28	03	7	Pelaksanaan Pengelolaan Hasil	Terlaksananya Pelaksanaan								

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2020	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
				Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000 Meter Kubik/ Tahun	Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000 Meter Kubik/ Tahun								
3	28	03	9	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan								
3	28	04		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap obyek kawasan konservasi SDA 8,5 %	Persentase perlindungan terhadap obyek kawasan konservasi SDA	0 %	0 %	0 %	100 %	8,5 %	8,5 %	100 %
				Persentase peningkatan perlindungan terhadap Ekosistem Esensial	Persentase peningkatan perlindungan terhadap Ekosistem Esensial 100 %	Persentase peningkatan perlindungan terhadap Ekosistem Esensial	50 %	0 %	0 %	100 %	100%	100 %	100 %
3	28	04	01	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Provinsi								

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2020	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
3	28	04	03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam								
3	28	05		Program pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Persentase Pemenuhan SDM Berkeahlian Khusus 33,91 %	Persentase Pemenuhan SDM Berkeahlian Khusus	29,27 %	0 %	0 %	100 %	32,78 %	32,78 %	100 %
					Persentase Luasan Hutan yang dimanfaatkan untuk sosial 11,25 %	Persentase Luasan Hutan yang dimanfaatkan untuk sosial	8,29 %	9,38 %	11, 72 %	124,95 %	11,25 %	11,25 %	100%
3	28	05		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								
3	28	06		Program Pengelolaan Daserah Aliran Sungai	Persentase kualitas DAS 0,30 %	Persentase Kualitas DAS	0 %	0,10 %	0,10 %	100 %	0,25 %	0,25 %	100%

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2020	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
3	28	06		Pelaksanaan Pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Satu Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Satu Daerah Provinsi								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Pengukuran kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam sektor Lingkungan Hidup dan kehutanan yaitu :

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/ Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Perubahan Renstra			Relisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang Tertangani Setiap Tahun	Persentase luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis/ Persentase target luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis X 100%	0,07%	1,22%	1,30%	1,02%	1,24%	1,22%	
2.	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	Jumlah target hutan wisata dan arboretum yang telah dibangun hingga akhir Renstra/ Jumlah seluruh pegawai DLHK x 100%	0%	32,78%	33,91%	29,27%	0%	32,78%	
3.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	Luas ijin Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan/ Luas pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial x 100%	9,38%	10,32%	11,25%	8,29%	11,72%	11,72%	
4.	Persentase Peningkatan Perlindungan terhadap Ekosistem Esensial di Destinasi Wisata	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan/ Jumlah target Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan hingga akhir Renstra x 100%	0%	75%	100%	50%	0%	100%	
5.	Persentase Meningkatnya Kualitas DAS	Jumlah Lokasi DAS yang dilakukuan usaha peningkatan kualitas DAS komulatif pertahun/ Jumlah DAS seluruh NTT x 100%	0,10%	0,30%	0,25%	0%	0,10%	0,30%	

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/ Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Perubahan Renstra			Relisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	Jumlah hutan wisata dan arboretum yang telah dibangun/ Jumlah target hutan wisata dan arboretum yang telah dibangun hingga akhir Renstra x 100%	2,5%	4,2%	8,5%	8,47%	2,52	4,2%	
7.	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun secara kumulatif pertahun/ Jumlah target seluruh dokumen perencanaan LH hingga akhir Renstra x 100%	42,86%	78,26%	100%	33,33%	42,86%	78,26%	
8.	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	Jumlah penghargaan lingkungan yang diberikan/ Jumlah pembinaan yang dilakukan dan jumlah usulan penghargaan lingkungan pada tahun berjalan x 100%	8,33%	16,67%	25,00%	NA	50%	50%	
9.	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	Jumlah pengaduan dan kasus yang disampaikan ke Dinas LHK/ Jumlah pengaduan dan kasus yang ditangani x 100%	33,33%	41,67%	50,00%	NA	100%	100%	
10.	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	Jumlah pengurangan dan penanganan sampah tahun berjalan/ Jumlah potensi timbulan sampah x 100%	0 %	26%	27%	NA	0%	27%	
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai IKLH pada tahun berjalan/ Nilai Target IKLH pada tahun berjalan x 100%	75,13 Poin	75,42 Poin	75,66 Poin	67,75 poin	74,21 Poin	75,66 Poin	
12.	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diolah oleh UPTD PLSB3/ Jumlah potensi timbulan limbah B3 x 100%	10	27,33	51,33	0%	11,18%	51,33%	
13.	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin	Jumlah dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH yang diterbitkan/ Jumlah	58,26%	79,09%	100%	40%	76%	100%	

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/ Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Perubahan Renstra			Relisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PPLH	target seluruh dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH hingga akhir Renstra x 100%							

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Isu Strategis Terkait Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai;
3. Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional;
4. Belum dilakukan rencana pengembangan sumberdaya manusia ASN;
5. Belum terlaksananya pembangunan Pusat Data Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.3.2. Isu Strategis Terkait Urusan Lingkungan Hidup

1. Menurunnya daya dukung dan fungsi layanan jasa ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air;
2. Berkurangnya tutupan vegetasi dan alih fungsi lahan produktif;
3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan;
4. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.

2.3.3. Isu Strategis Terkait Urusan Kehutanan

1. Belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan;
2. Masih adanya lahan kritis walaupun kondisi daya dukung fungsi lindung dalam kategori baik;
3. Belum adanya hutan pendidikan, riset dan wisata (arboretum);
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

5. Meningkatnya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan.

2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan mengacu pada alokasi anggaran RKPD, namun terdapat penyesuaian pagu RKPD untuk mengikuti capaian output setiap program dan kegiatan seperti tergambar pada tabel berikut :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya urusan penunjang pada perangkat daerah	12 Bulan/ 100 %	98.772.324.416	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya urusan penunjang pada perangkat daerah	12 Bulan/ 100 %	98.772.324.416	
2	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	563.952.600	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	563.952.600	
	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya dokumen RPPLH	1 Dokumen	113,952,600	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya dokumen RPPLH	1 Dokumen	113,952,600	
	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya Dokumen KLHS	3 Dokumen	450.000.000	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya Dokumen KLHS	3 Dokumen	450.000.000	
3.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	1.324.280.692	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	1.324.280.692	
	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran LH	1 Paket	1.177.088.792	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran LH	1 Paket	1.177.088.792	
	2.11.03.1.02 Penanggulangan	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya Penanggulangan	1 Paket	147.191.900	2.11.03.1.02 Penanggulangan	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya Penanggulangan	1 Paket	147.191.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		an pencemaran LH			Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		pencemaran LH			
4.	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33 %	3.141.513.580	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33 %	3.141.513.580	
	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33 %	3.141.513.580	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33 %	3.141.513.580	
5.	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	79,09 %	383.474.600	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	79,09 %	383.474.600	
	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	79,09 %	383.474.600	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	79,09 %	383.474.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
6	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	16,67%	104.666.000	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	16,67%	104.666.000	
	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	16,67%	104.666.000	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	16,67%	104.666.000	
7	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)	Terselesaikann ya kasus lingkungan hidup	50%	174.664.300	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)	Terselesaikannya kasus lingkungan hidup	50%	174.664.300	
	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)	Terselesaikann ya kasus lingkungan hidup	50%	174.664.300	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)	Terselesaikannya kasus lingkungan hidup	50%	174.664.300	
8	2.11.11 PROGRAM PENGLOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas LHK (10 Kabupaten / Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pengurangan sampah	26%	955.077.100	2.11.11 PROGRAM PENGLOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas LHK (10 Kabupaten / Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pengurangan sampah	26%	955.077.100	
	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dinas LHK			955.077.100	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dinas LHK			955.077.100	
9	3.28.03 PROGRAM PENGLOLAAN HUTAN	22 Kabupaten/ Kota	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,30%	18.790.028.273	3.28.03 PROGRAM PENGLOLAAN HUTAN					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	22 Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen RPHJP	22 Dokumen	611.403.700	3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	22 Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen RPHJP	22 Dokumen	611.403.700	
	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah persemaian - Luas RHL - Jumlah KTA	- 22 Unit - 1.475 Ha - 179 Unit	14.064.621.906	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah persemaian - Luas RHL - Jumlah KTA	- 22 Unit - 1.475 Ha - 179 Unit	14.064.621.906	
	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota	- Perlindungan hutan	100 %	2.512.924.970	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota	- Perlindungan hutan	100 %	2.512.924.970	
	3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah sarpras AEP - Pengembangan HHBK	- 6 Unit - 1 Paket	1.080.700.297	3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah sarpras AEP - Pengembangan HHBK	- 6 Unit - 1 Paket	1.080.700.297	
	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	22 Kabupaten/ Kota	- Penertiban peredaran hasil hutan	1 Paket	520.377.400	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun2	22 Kabupaten/ Kota	- Penertiban peredaran hasil hutan	1 Paket	520.377.400	
10	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Ngada, Sikka	- Persentase perlindungan terhadap objek kawasan KSDA - Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial	- 8,5% - 100%	926.758.620	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Ngada, Sikka	- Persentase perlindungan terhadap objek kawasan KSDA - Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial	- 8,5% - 100%	926.758.620	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat	- Jumlah KEE - Jumlah Arboretum	- 2 Unit - 5 Unit	453.457.200	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat	- Jumlah KEE - Jumlah Arboretum	- 2 Unit - 5 Unit	453.457.200	
	3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Manggarai Timur, Ngada,Sikka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya	Terlaksananya pengembangan hutan wisata	5 Unit	473.301.420	3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Manggarai Timur, Ngada,Sikka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya	Terlaksananya pengembangan hutan wisata	3 Unit	473.301.420	
11	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten Kota	- Persentase pemenuhan SDM Berkeahlian Khusus - Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	- 33,91% - 11,25%	1.485.267.840	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten Kota	Terlaksananya fasilitasi perijinan PS dan fasilitasi KTH	100%	1.485.267.840	
	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten Kota	- Persentase pemenuhan SDM Berkeahlian Khusus - Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	- 33,91% - 11,25%	1.485.267.840	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten Kota	- Persentase pemenuhan SDM Berkeahlian Khusus - Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	- 33,91% - 11,25%	1.485.267.840	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas LHK	Persentase peningkatan kualitas DAS	0,30%	435.000.000	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas LHK	Persentase peningkatan kualitas DAS	0,30%	435.000.000	
	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK	Jumlah DAS yang dipulihkan	8 DAS	435.000.000	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK	Jumlah DAS yang dipulihkan	8 DAS	435.000.000	
TOTAL					127.426.220.021	TOTAL				127.426.220.021	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat terutama pada pola-pola pengembangan kehutanan berbasis masyarakat yang disampaikan kepada penyuluh kehutanan pada UPTD KPH yang tersebar di 22 Kabupaten/ Kota di NTT, hal demikian yang mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Program dan Kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat serta peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Adapun penelaahan usulan tersebut tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.1 Usulan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
1	Pengembangan lebah madu	Alor, Manggarai Barat, Manggarai Timur,	Jumlah stup lebah madu	450 stup	
2	Rehabilitasi hutan rakyat	22 Kabupaten/ Kota	Luas hutan rakyat	2.200 Ha	
3	Pengembangan Porang	TTS, TTU, Kab. Kupang, Alor, Sumba tengah, SBD, Lembata	Luas pengembangan porang	800 Ha	
4	Pengembangan tanaman obat-obatan	Kupang, Sumba Timur, Alor, Ende, Nagekeo, Manggarai	Luas tanaman obat-obatan	300 Ha	
5	Pengembangan Bambu	Ngada, Sikka, Ende, Kab. Kupang	Luas areal pengembangan bambu	400 Ha	

Usulan masyarakat tersebut menjadi masukan untuk dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di NTT.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menetapkan 4 tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain tujuan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga menetapkan sasaran pembangunan tahun 2020-2024, diantaranya:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
 - ❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - ❖ Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah
 - ❖ Penurunan laju Deforestasi
 - ❖ Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
 - ❖ Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan
 - ❖ Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:
 - ❖ Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional
 - ❖ Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan
 - ❖ Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
 - ❖ Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan

- ❖ Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan
 - ❖ Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:
- ❖ Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan
 - ❖ Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum
 - ❖ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE)
 - ❖ Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif
 - ❖ Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
 - ❖ Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK
 - ❖ Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan
 - ❖ Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan turunan dari Rencana Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah, tujuan dan sasaran tersebut dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator sasaran PD
1	Mewujudkan masyarakat NTT yg makmur dan sejahtera	Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	Pemanfaatan Kawasan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial sesuai Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial.	persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial
2	Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (Prime Mover)	Pengembangan Pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A Pariwisata Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	Pengembangan hutan wisata/arboretum untuk menunjang destinasi prioritas pariwisata Provinsi NTT	persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata.
3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas	Tersedianya Infrastruktur Pengairan	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi	Meningkatnya Kualitas	Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang

	Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan	yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	Petani (%)	Lingkungan Hidup Daerah	Tertangani Setiap Tahun
				Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA
4	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH
					Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah
5	Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
					Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah
					Persentase pemenuhan SDM berkeahlian Khusus

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.2. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2023
1	Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Secara Bijaksana, Berkeadilan dan Berkelanjutan.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,25 %
		Persentase Peningkatan Perlindungan terhadap Ekosistem Essensial di Destinasi Wisata	100 %
2	Mewujudkan lingkungan Hidup yang berkualitas dan Hutan yang lestari	Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang Tertangani Setiap Tahun	1,30 %
		Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	8,5 %
		Persentase pemenuhan SDM berkeahlian Khusus	33,91 %
		Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	25%
		Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	100 %
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	50 %
		Persentase Meningkatnya Kualitas DAS	0,30 %
		Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	27 %
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,66 Poin
		Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	51,33 %
		Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	100 %

Tabel 3.2.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,66 Poin

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”, dalam mendukung pencapaian visi tersebut melalui sektor lingkungan hidup dan kehutanan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 mengusulkan program dan kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.1.1 Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan	Lokasi
1	2
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dinas LHK (15 Kabupaten, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)

Program/ Kegiatan	Lokasi
1	2
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	22 Kabupaten/ Kota
3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	22 Kabupaten/ Kota
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	22 Kabupaten/ Kota
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	22 Kabupaten/ Kota
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22 Kabupaten/ Kota
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Conversion On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Kupang, TTS, Alor, Manggarai Barat, Manggarai Timur.
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten/ Kota
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten/ Kota
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dirinci jumlah program dan kegiatan pada Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sebarannya dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1.2

No	Keterangan	Jumlah	Sebaran
1	Jumlah Program	12 Program	22 Kabupaten/Kota
2	Jumlah Kegiatan	27 Kegiatan	22 Kabupaten/Kota

Rancangan awal Renstra total kebutuhan dana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebesar Rp. 127.426.220.021 (Seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu dua puluh satu rupiah), selanjutnya alokasi APBD Murni dan DAK dapat dilihat pada tabel berikut :

4.1.3 Tabel Alokasi Anggaran berdasarkan sumber anggaran tahun 2022

NO	SUMBER DANA	ALOKASI
1	APBD Murni	Rp 110.529.679.901
2	Dana Alokasi Khusus	Rp 16.896.540.120
TOTAL		Rp 127.426.220.021

Tabel 4.1.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	Perkiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya urusan penunjang pada perangkat daerah	12 Bulan/ 100%	98,772,324,416	-	106,674,110,369
2	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	563,952,600	-	609,068,808
	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya dokumen RPPLH	1 Dokumen	113,952,600	-	123,068,808
	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya Dokumen KLHS	3 Dokumen	450,000,000	-	486,000,000
3	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	1,324,280,692	-	1,430,223,147
	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran LH	1 Paket	1,177,088,792	-	1,271,255,895
	2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya Penanggulangan pencemaran LH	1 Paket	147,191,900	-	158,967,252
4	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas LHK	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33 %	3,141,513,580	-	3,392,834,666
	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33 %	3,141,513,580	-	3,392,834,666
5	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LHK	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	79,09 %	383,474,600	-	414,152,568
	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas LHK	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	79,09 %	383,474,600	-	414,152,568

6	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas LHK	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	16,67 %	104,666,000	-	113,039,280
	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas LHK	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	16,67 %	104,666,000	-	113,039,280
7	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK	Terselesaikannya kasus lingkungan Hidup	50 %	174,664,300	-	188,637,444
	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Dinas LHK	Terselesaikannya kasus lingkungan Hidup	50 %	174,664,300	-	188,637,444
8	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas LHK	Persentase pengurangan sampah	26 %	955,077,100	-	1,031,483,268
	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dinas LHK			955,077,100	-	1,031,483,268
9	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	22 Kabupaten/ Kota	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,30 %	18,790,028,273	-	20,293,230,535
	3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	22 Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen RPHJP	22 Dokumen	611,403,700	-	660,315,996
	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota	-Jumlah persemaian -Luas RHL -Jumlah KTA	- 22 Unit - 1.475 Ha - 179 Unit	14,064,621,906	-	15,189,791,658
	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota	-Perlindungan hutan	100 %	2,512,924,970	-	2,713,958,968
	3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	22 Kabupaten/ Kota	-Jumlah sarpras AEP -Pengembangan HHBK	-6Unit - 1 Paket	1,080,700,297	-	1,167,156,321
	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	22 Kabupaten/ Kota	-Penertiban peredaran hasil hutan	1 Paket	520,377,400	-	562,007,592
10	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Ngada, Sikka	-Persentase perlindungan terhadap objek kawasan KSDA -Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial	- 8,5 % - 100 %	926,758,620	-	1,000,899,310
	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan	Kota Kupang, TTS,	-Jumlah KEE	- 2 Unit	453,457,200	-	489,733,776

	Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat	-Jumlah Arboretum	- 5 Unit			
	3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya	Terlaksananya pengembangan hutan wisata	5 Unit	473,301,420	-	511,165,534
11	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten Kota	-Persentase pemenuhan SDM Berkeahlian Khusus -Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	- 33,91 % - 11,25 %	1,485,267,840	-	1,604,089,267
	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten Kota	-Persentase pemenuhan SDM Berkeahlian Khusus -Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	- 33,91 % - 11,25 %	1,485,267,840	-	1,604,089,267
12	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas LHK	Persentase peningkatan kualitas DAS	0,30%	435,000,000	-	469,800,000
	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK	Jumlah DAS yang dipulihkan	8 DAS	435,000,000	-	469,800,000
TOTAL					1 27,426,220,021		167,769,026,956

Rekapitulasi Program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.5. Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan		Pagu indikatif	Ket
1	Peningkatan Kerjasama Multi Pihak untuk pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	8.117.966.126	
		3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	6.572.966.126	Pembangunan dan pengembangan hutan wisata
2	Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta pengolahan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon	2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.039.471.691	
		2.11.02.1.01	KEGIATAN: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	359.471.691	penetapan dan evaluasi IKPLH, IKPLHD, DDDT dan RPPLH
		2.11.02.1.02	KEGIATAN: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	680.000.000	kepatuhan dan efektifitas integrasi hasil KLHS ke dalam Rencana Tata Ruang serta rencana Pembangunan daerah
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.055.530.070	
		2.11.03.1.01	KEGIATAN: Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.970.530.070	pencegahan pencemaran LH terhadap media tanah, air, udara dan laut, serta pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan Laboratorium LH
		2.11.03.1.02	KEGIATAN: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	85.000.000	pembangunan biogas
		2.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7.642.505.016	

	2.11.05.1.01.	KEGIATAN: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	7.642.505.016	pengoperasian dan Pembangunan Incenerator
	2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	108.000.000	
	2.11.06.1.01.	KEGIATAN: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	108.000.000	pengawasan usaha/kegiatan yang sesuai dengan perundang undangan
	2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	541.932.352	
	2.11.09.1.01.	KEGIATAN: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi NTT	541.932.352	Penerapan Jakstrada dan pemberian penghargaan Lingkungan kepada Kab/kota, sekola dan individu terkait pengelolaan LH
	2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	277.451.100	
	2.11.10.1.01.	KEGIATAN: Penyelesaian Pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	277.451.100	Kasus lingkungan dan kehutana yang tertagani
	2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	555.283.426	
	2.11.11.1.01.	KEGIATAN: Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	555.283.426	Pilot Project Pengolahan Sampah berbasis masyarakat, Pelaksanaan Eco-Office, Evaluasi Kinerja dan identifikasi sarana dan prasaran Pengelolaan sampah
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	24.250.062.801	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	17.819.753.261	Penanaman 1955 ha dan pemeliharaan tanaman 751 ha serta Penyediaan bibit tanaman 600000 bibit

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022.

Diharapkan dengan tersusunya rencana kerja ini, dapat menjadi acuan dalam mencapai prioritas pembangunan daerah sector lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022 yaitu :

- a. Pemanfaatandan pengembangan hasil hutan bukan kayu (Jahe merah, Porang, Bambu) berbasis perhutanan sosial dengan luasan hutan yang dimanfaatkan sebesar 10.32 %;
- b. Peningkatan Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata sebesar 75 % dan obyek kawasan konservasi SDA 4,2 %;
- c. Peningkatan kualitas DAS sebesar 0,25 %;
- d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum

Kupang, 31 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ondy Christian Siagian, SE.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19651219 199403 1 007